

**RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2026**



**KECAMATAN BATANG KAPAS
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Limau Sundai, 2025



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, atas limpahan rahmat, hidayah dan ridho-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan dengan baik.

Sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Secara substansi, Dokumen Renja Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 memuat hasil evaluasi Renja Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan tahun lalu (n-2), tujuan dan sasaran Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan, serta rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja (Renja) ini masih terdapat kekurangan dan belum sempurna seperti yang diharapkan, oleh karena itu kami mengharapkan saran-saran yang akan menjadi masukan dalam identifikasi permasalahan pembangunan, arah kebijakan pembangunan, program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja, penyelarasan dengan sasaran dan prioritas nasional, dan identifikasi program dan kegiatan di masa yang akan datang. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dokumen ini, kami ucapkan terimakasih, Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'aala memberkahi kerja kita, aamiin.

Batang Kapas, 17 September 2025
CAMAT BATANG KAPAS,



LEGIANDRU, S.STP

Penata Tk.1 / III.d

NIP. 199212302014061001



DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR | I |
| DAFTAR ISI | li |
| DAFTAR TABEL | lii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum..... | 3 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 5 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 5 |
| | |
| BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU | 7 |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah | 7 |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | 18 |
| 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | 22 |
| 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD | 25 |
| 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat | 31 |
| | |
| BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | 36 |
| 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional | 36 |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah..... | 36 |
| 3.3 Program dan Kegiatan..... | 39 |
| | |
| BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH | 50 |
| | |
| BAB V PENUTUP | 60 |



DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|---|----|
| Tabel 2.1 | Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Pesisir selatan | 8 |
| Tabel 2.2 | Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan | 22 |
| Tabel 2.3 | Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Pesisir Selatan | 27 |
| Tabel 2.4 | Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan | 34 |
| Tabel 3.1 | Tujuan dan Sasaran Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 | 40 |
| Tabel 3.2 | Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 | 44 |
| Tabel 4.1 | Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan | 53 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD daerah yang wajib disusun oleh seluruh Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja ini memuat kerangka pendanaan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kecamatan maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

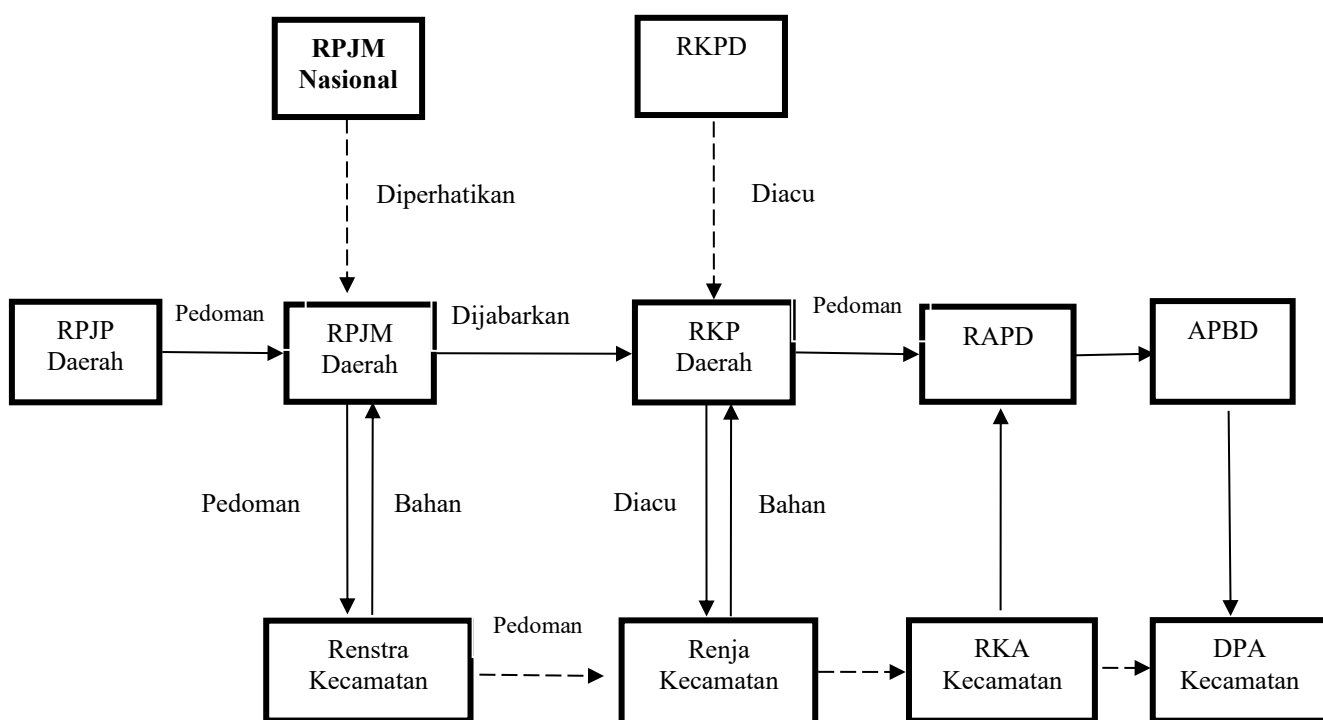
Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan untuk periode Tahun 2026 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Pesisir selatan

dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2026. Hasil perumusan Rencana Kerja disajikan dengan sistematika yang meliputi: pendahuluan, hasil evaluasi Rencana Kerja tahun lalu, tujuan dan sasaran, rencana kerja pendanaan dan penutup.

Renja Kecamatan Batang Kapas Tahun 2026 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Kecamatan Batang Kapas Tahun 2026 dapat dilihat pada gambar 1.1 sebagai berikut:

Gambar 1.1: Tahapan Penyusunan Renja Kecamatan Batang Kapas Tahun 2026



Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja Kecamatan Batang Kapas mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Rencana Kerja merupakan dokumen yang secara substansi menterjemahkan visi, misi dan program yang ditetapkan dalam Rencana

Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan acuan bagi Perangkat Daerah untuk memasukkan program dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2026.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2009 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor ... Tahun tentang Rencana Strategis Kecamatan Batang Kapas Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. tanggal 30 Desember 2025;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 . Tanggal 30 Desember 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di lingkup Kecamatan Batang Kapas dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 adalah:

1. Menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2026 Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2026 Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Menciptakan kepastian kebijakan sebagai bentuk komitmen Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Pada bab ini menjelaskan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan capaian Renstra Kecamatan Batang Kapas, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Daerah serta Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini menjelaskan mengenai Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, serta Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini menjelaskan mengenai Program beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan.

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 senilai Rp 2.310.967.934,- (Dua milyar tiga ratus sepuluh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) terdiri dari 5 (lima) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan, realisasi anggaran senilai Rp. Rp.2.080.861.847,- (Dua milyar delapan puluh juta delapan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah). Untuk menilai kinerja capaian keuangan dan hasil kegiatan, status capaian kinerja dikelompokkan menjadi "Sangat Tinggi" yaitu capaian berkisar antara >90-100%, "Tinggi" yaitu capaian berkisar antara >75-90%, "Sedang" yaitu capaian berkisar antara >65-75%, "Rendah" yaitu capaian berkisar antara 50-65%, dan "Sangat Rendah" yaitu capaian di bawah 50%.

Berdasarkan capaian kinerja keuangan pelaksanaan Renja tahun 2024 terdapat 10 (sepuluh) kegiatan yang dengan status capaian "Sangat Tinggi" (90,04%). Untuk capaian kinerja keluaran (*output*) kegiatan semuanya sudah tercapai sesuai perencanaan.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat dari berbagai indikator pada setiap sasaran yang akan dicapai Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan Tabel Rekapulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKT Kecamatan Batang Kapas dan Pencapaian Renstra Kecamatan Batang Kapas sampai dengan Tahun berjalan, dengan Tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1
Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025
Kabupaten Pesisir Selatan

: Kecamatan Batang
Kapas

Nama Perangkat Daerah

| KODE 1 | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan(output) | Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu(n-2) | | | Target program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024) 1 | Perkiraan Realisasi Capaian Target renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | | |
|-----------|--|--|--|---|---|--|-----------------------------|--|--|--|-------------------|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 | Realisasi Renja perangkat Daerah Tahun 2023 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n-1) 2025 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 1 | 2 | 3 | |
| 00 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K OTA | Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | 2.283.000.000 | 1.791.182. 015 | 001 | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K OTA | Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | 2.283.000. 000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|----------|---|---|--|----------------------|----------------------|------------|----------|-----------|----|---|--|----------------------|
| 00 | 2 | 0 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi | 18.000.000 | 3.584.500 | 001 | 2 | 01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi | 18.000.000 |
| 00 | 2 | 0 | 0 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 9.000.000 | 2.384.500 | 001 | 2 | 01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 9.000.000 |
| 00 | 2 | 0 | 0 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 9.000.000 | 1.200.000 | 001 | 2 | 01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 9.000.000 |
| 00 | 2 | 0 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah ASN difasilitasi | 1.914.000.000 | 1.563.163.099 | 001 | 2 | 02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah ASN difasilitasi | 1.914.000.000 |
| 00 | 2 | 0 | 0 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 1.850.000.000 | 1.499.163.099 | 001 | 2 | 02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 1.850.000.000 |
| 00 | 2 | 0 | 0 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 64.000.000 | 64.000.000 | 001 | 2 | 02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 64.000.000 |
| 00 | 2 | 0 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang difasilitasi | 174.000.000 | 120.729.300 | 001 | 2 | 06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang difasilitasi | 174.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--------|--------|--|--|------------|----------------|-----|---|----|----|--|--|----------------|
| 00 1 | 2 | 0 6 | 0 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 3.500.000 | 1.908.000 | 001 | 2 | 06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 3.500.000 |
| 00 1 | 2 | 0 6 | 0 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 20.000.000 | 27.890.00 0 | 001 | 2 | 06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 20.000.00 0 |
| | | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | 15.000.000 | | | | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | 15.000.00 0 |
| 00 1 | 2 | 0 6 | 0 4 | Penyediaan Bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 21.000.000 | 17.535.30 0 | 001 | 2 | 06 | 04 | Penyediaan Bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 21.000.00 0 |
| 00 1 | 2 | 0 6 | 0 5 | Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 10.000.000 | 6.633.000 | 001 | 2 | 06 | 05 | Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 10.000.00 0 |
| 00 1 | 2 | 0 6 | 0 6 | Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang - undangan. | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan | 4.500.000 | 3.240.000 | 001 | 2 | 06 | 06 | Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang - undangan. | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan | 4.500.000 |
| 00 1 | 2 | 0 6 | 0 8 | Fasilitasi kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 20.000.000 | 14.413.00 0 | 001 | 2 | 06 | 08 | Fasilitasi kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 20.000.00 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|--|--|-------------------|-------------------|-----|---|----|----|--|--|-------------------|
| 001 | 2069 | Penyelenggaraan rapat koord.dan konsultasi SKPD. | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 80.000.000 | 49.110.000 | 001 | 2 | 06 | 09 | Penyelenggaraan rapat koord.dan konsultasi SKPD. | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 80.000.000 |
| 001 | 208 | Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 78.000.000 | 20.878.316 | 001 | 2 | 08 | | Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 78.000.000 |
| 001 | 2082 | Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya air dan listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan | 20.000.000 | 6.783.316 | 001 | 2 | 08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya air dan listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan | 20.000.000 |
| 001 | 2084 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 58.000.000 | 14.095.000 | 001 | 2 | 08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 58.000.000 |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 25.000.000 | | | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 25.000.000 |
| | | Pengadaan Mebel | Jumlah Mebel yang dibeli | | | | | | | Pengadaan Mebel | Jumlah Mebel yang dibeli | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----|----|---|--|-------------------|-------------------|-----|---|----|---------------------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dibeli | 25.000.000 | | | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dibeli | 25.000.000 | |
| 001 | 2 | 09 | | Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah | jumlah BMD yang dipelihara | 74.000.000 | 82.826.800 | 001 | 2 | 09 | | Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah | jumlah BMD yang dipelihara | 74.000.000 |
| 001 | 2 | 09 | 00 | Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan. | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 50.000.000 | 20.662.800 | 001 | 2 | 09 | 01 | Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan. | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 50.000.000 |
| 001 | 2 | 09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 4.000.000 | 2.710.000 | 001 | 2 | 09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 4.000.000 |
| 001 | 2 | 09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya. | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 20.000.000 | 7.454.000 | 001 | 2 | 09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya. | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 20.000.000 |

| | | | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi | | | | | | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi | |
|----|---|----|--|--|-------------------|-------------------|-----|---|----|--|--|-------------------|
| 00 | 2 | | PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Tingkat kepuasan terhadap pelayanan kecamatan | 85.000.000 | 75.689.000 | 002 | | | PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Tingkat kepuasan terhadap pelayanan kecamatan | 85.000.000 |
| | | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | | 15.000.000 | 27.032.000 | | | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | | 15.000.000 |
| | | | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan | | 15.000.000 | 27.032.000 | | | | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan | | 15.000.000 |
| 00 | 2 | 04 | Pelaksanaan Urusan pemerintahan yg dilimpahkan kepada camat. | Jumlah izin yang direkomendasikan | 70.000.000 | 48.657.000 | 002 | 2 | 04 | Pelaksanaan Urusan pemerintahan yg dilimpahkan kepada camat. | Jumlah izin yang direkomendasikan | 70.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--------|--------|--|--|------------|----------------|-----|---|----|----|--|--|----------------|
| 00 2 | 2 | 0 4 | 0 1 | Pelaksanaan urusan Pemerintahan yg terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | 5.000.000 | 700.000 | 002 | 2 | 04 | 01 | Pelaksanaan urusan Pemerintahan yg terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | 5.000.000 |
| 00 2 | 2 | 0 4 | 0 2 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan non perizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | 5.000.000 | | 002 | 2 | 04 | 02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan non perizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | 5.000.000 |
| 00 2 | 2 | 0 4 | 0 3 | Pelaksanaan urusan Pemerintahan yg terkait dengan Kewenangan Lain yg dilimpahkan | jumlah laporan pelaksanann kewenangan lain yang dilimpahkan | 60.000.000 | 47.957.00 0 | 002 | 2 | 04 | 03 | Pelaksanaan urusan Pemerintahan yg terkait dengan Kewenangan Lain yg dilimpahkan | jumlah laporan pelaksanann kewenangan lain yang dilimpahkan | 60.000.00 0 |
| 00 3 | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN | Persentase usulan masyarakat yang menjadi prioritas kecamatan | 20.000.000 | 6.643.000 | 003 | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN | Persentase usulan masyarakat yang menjadi prioritas kecamatan | 20.000.00 0 |
| 00 3 | 2 | 0 1 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa. | Jumlah kegiatan pemberdayaan desa | 20.000.000 | 6.643.000 | 003 | 2 | 01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa. | Jumlah kegiatan pemberdayaan desa | 20.000.00 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--------|--------|--|---|------------|-----------|-----|---|----|----|--|---|------------|
| 00 3 | 2 | 0 1 | 0 1 | Peningkatan Partisipasi Masy.Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. | jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa | 20.000.000 | 6.643.000 | 003 | 2 | 01 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masy.Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. | jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa | 20.000.000 |
| 00 3 | 2 | 0 1 | 0 3 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masy.di Wilayah Kecamatan. | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | 003 | 2 | 01 | 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masy.di Wilayah Kecamatan. | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | |
| 00 4 | | | | PROGRAM KOORDINASI KENTENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan | 12.000.000 | 3.609.000 | 004 | | | | PROGRAM KOORDINASI KENTENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan | 12.000.000 |
| 00 4 | 2 | 0 1 | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum. | Jumlah kasus yang diselesaikan | 12.000.000 | 3.609.000 | 004 | 2 | 01 | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum. | Jumlah kasus yang diselesaikan | 12.000.000 |
| 00 4 | 2 | 0 1 | 0 1 | Sinegritas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia ,tentara nasioanl Ind.dan Instansi Vertikal di Wilayah Kec. | jumlah laporan hasil Sinegritas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia ,tentara nasioanl Ind.dan Instansi Vertikal di Wilayah Kec. | 6.000.000 | 3.609.000 | 004 | 2 | 01 | 01 | Sinegritas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia ,tentara nasioanl Ind.dan Instansi Vertikal di Wilayah Kec. | jumlah laporan hasil Sinegritas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia ,tentara nasioanl Ind.dan Instansi Vertikal di Wilayah Kec. | 6.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--------|--------|---|---|------------|------------|-----|---|----|----|---|---|------------|
| 00 4 | 2 | 0 1 | 0 2 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 6.000.000 | | 004 | 2 | 01 | 02 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 6.000.000 |
| 00 5 | | | | PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase penugasan terkait pemerintahan umum yang dilaksanakan | 26.000.000 | 17.726.500 | 005 | | | | PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase penugasan terkait pemerintahan umum yang dilaksanakan | 26.000.000 |
| 00 5 | 2 | 0 1 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala Daerah | Jumlah Kegiatan difasilitasi | 26.000.000 | 17.726.500 | 005 | 2 | 01 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala Daerah | Jumlah Kegiatan difasilitasi | 26.000.000 |
| 00 5 | 2 | 1 0 | 3 | Pembinaan Persatuan dan kesatuan bangsa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 20.000.000 | 12.166.500 | 005 | 2 | 1 | 03 | Pembinaan Persatuan dan kesatuan bangsa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 20.000.000 |

Sumber Data : Kecamatan Batang Kapas 2025

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2024 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Kecamatan Batang Kapas Tahun 2021-2026.

Adapun Evaluasi terhadap capaian Pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 senilai **Rp 2.008.290.325,-** (Dua milyar delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), dengan realisasi anggaran sampai dengan kondisi Triwulan II sebesar **Rp1.011.012,270,-** (Satu milyar sebelas juta dua belas ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).

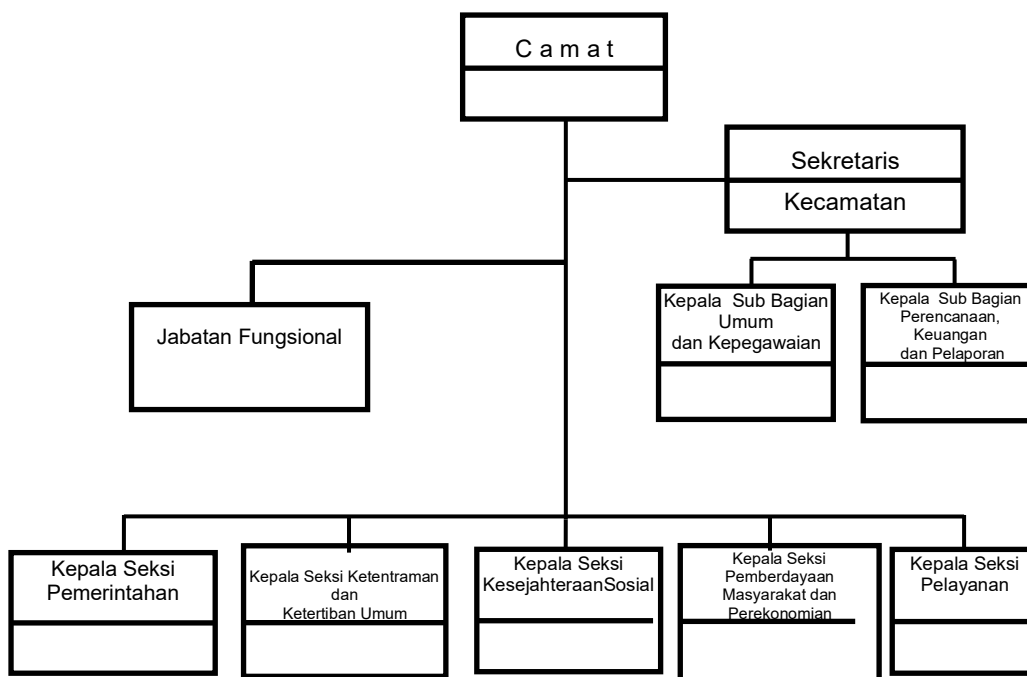
Berdasarkan capaian kinerja keuangan pelaksanaan Renja tahun 2025 terdapat 5 program 10 kegiatan dengan capaian 50,34% hal ini disebabkan karena realisasi masih dalam kondisi Triwulan II dan masih banyaknya kegiatan yang pelaksanaannya akan dilakukan pada Triwulan III dan IV. Sehingga secara garis besar capaian kinerja keluaran (output) kegiatan pada kondisi Triwulan II sudah tercapai sesuai perencanaan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, diamanatkan bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Selanjutnya, berdasarkan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani unsur kewilayahan.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Nagari;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang Undangan.



Adapun Susunan Organisasi Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

- a. Camat;
- b. Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian, terdiri dari:
 - (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - (2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;

- e. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian;
- g. Seksi Pelayanan;
- h. Jabatan Fungsional.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut :

A. Kinerja pelayanan di bidang Pemerintahan

1. Peningkatan dan perwujudan siskamling di tingkat Nagari dan kampung
2. Mengadakan sosialisasi peraturan perundang-undangan di seluruh Nagari bersama dengan jajaran Muspika dan Dinas atau Instansi terkait.
3. Memberikan arahan kepada pemerintahan Nagari untuk membuat peraturan Nagari sebagai payung hukum di tingkat Nagari.
4. Memberikan pembinaan kepada penambangan galian C.
5. Melakukan pembinaan dalam peningkatan PBB.
6. Kerjasama wilayah perbatasan
7. Penataan pelayanan public dan terpadu di Kecamatan (satu) pintu.
8. Pelaksanaan apel gabungan di kecamatan
9. Memberikan kesempatan kepada aparatur untuk mengikuti diklat,kursus dalam peningkatan sumber daya aparatur Kecamatan dan Nagari
10. Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan dinas instansi terkait di tingkat Nagari, Kecamatan dan Kabupaten.
11. Pembinaan kelengkapan administrasi Nagari dan pendampingan dalam membuat APB-Nagari.

B. Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan

1. Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan dengan memfasilitasi, membina, dan memantau kegiatan peningkatan infrastruktur yang berbasis masyarakat (Kemitraan, swadaya murni, UPK, dan lain-lain)
2. Memfasilitasi,membina dan memantau kegiatan revitalisasi pertanian, perikanan, dan peternakan.
3. Pemberdayaan masyarakat pinggir kawasan hutan

4. Fasilitasi pembentukan kelompok HKm (Hutan Kemasyarakatan)
5. Fasilitasi peningkatan produk unggulan Nagari
6. Monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang kecamatan.
7. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Gerakan Keluarga Berencana serta kesehatan.
8. Pembinaan kelompok simpan pinjam dan Program UPK.

C. Kinerja Pelayanan di Bidang Kemasyarakatan

1. Monitoring penyaluran Beras rumah tangga miskin (Raskin)
2. Memfasilitasi pembangunan tempat-tempat ibadah
3. Pelaksanaan Peringatan hari-hari besar Keagamaan
4. Pelaksanaan Peringatan hari Bakti Transmigrasi
5. Monitoring penyaluran Jamkesmas dan Jamkesda
6. Membantu penanganan masalah sosial dan bencana alam
7. Pembinaan di bidang kepemudaan yang terkait dengan kegiatan olahraga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana

Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan. Kinerja Pelayanan Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

1. Nilai AKIP Perangkat Daerah.
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
3. Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan
4. Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik
5. Angka Kemiskinan Ekstrim
6. Prevalensi Stunting (Eppgbm)
7. Persentase Konflik yang Diselesaikan

Berikut dibawah ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan dengan format Tabel T-C.30 sebagai berikut:

Tabel 2.2 T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Batang Kapas
Kabupaten Pesisir Selatan

| No | Indikator | SPM/ Standar Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|----|---|-----------------------------|-----|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|--|
| | | | | Tahun 2024 (thn n-2) | Tahun 2025 (thn n-1) | Tahun 2026 (thn n) | Tahun 2027 (thn n+1) | Tahun 2024 (thn n-2) | Tahun 2025 (thn n-1) | Tahun 2026 (thn n) | Tahun 2027 (thn n+1) | |
| 1 | Nilai AKIP Perangkat Daerah | - | - | A (80,5) | A (80,5) | A (81) | A (81,5) | CC (51,71) | | A (81,0) | A (81,5) | Realisasi 2024 dan proyeksi 2026-2027 memakai angka target |
| 2. | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | - | - | 85 | 90,2 | 91 | 92 | | | 91 | 92 | Realisasi 2024 dan proyeksi 2026-2027 memakai angka target |
| 3. | Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan | | | 75 | 90 | 91 | 92 | 85 | | 91 | 92 | Realisasi 2024 dan proyeksi 2026-2027 memakai angka target |
| 4. | Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik | - | - | 75% | 75% | 80% | 83% | 75% | | 80% | 83% | Realisasi 2024 dan proyeksi 2026-2027 memakai angka target |
| 5. | Angka Kemiskinan Ekstrim | - | - | 0 | 0% | 0% | 0% | - | | 0% | 0% | Realisasi 2024 dan proyeksi 2026-2027 memakai angka target |
| 6. | Prevalensi Stunting (Eppgbm) | - | - | 7% | 6,65% | 6,5% | 6,4% | - | | 6,5% | 6,4% | Realisasi 2024 dan proyeksi 2026-2027 memakai angka target |
| 7. | Persentase Konflik yang Diselesaikan | - | - | 80% | 80% | 82% | 84% | 80% | | 82% | 84% | Realisasi 2024 dan proyeksi 2026-2027 memakai angka target |

Sumber Data: Kecamatan Batang Kapas

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Terdapat beberapa isu strategis yang perlu diantisipasi oleh Perangkat Daerah Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut:

1) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah :

a. Kecamatan

Permasalahan Kecamatan Batang Kapas dalam melaksanakan tupoksinya adalah masih lemahnya atau belum optimalnya pola Koordinasi fasilitasi, Motivasi lintas sektor di setiap Tupoksi Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan, Kesejahteraan Masyarakat, yang disebabkan:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia yang belum memadai;
2. Etos kerja yang belum terbina secara optimal;
3. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan;
4. Belum tertib dan lemahnya sistem administrasi Perkantoran;
5. Perencanaan program dan kegiatan yang belum tepat sasaran sehingga belum terwujudnya pemerintahan yang good governance

Adapun Permasalahan khusus yang muncul dalam pelaksanaan tupoksi Kecamatan Batang Kapas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Seksi Pemerintahan

- a. Urusan Pencapaian Target PBB-P2 memiliki permasalahan:
 1. Masih banyaknya masyarakat yang tidak membayar PBB-P2.
 2. Keberadaan wajib pajak tidak diketahui keberadaannya. Upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan koordinasi dengan Dinas terkait dalam meningkatkan pelayanan wajib pajak.
- b. Peraturan Nagari, masalahnya:

Masih rendahnya kepedulian Nagari dalam merumuskan dan membuat peraturan Nagari sebagai payung hukum bagi nagari dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan.

Upaya yang dilakukan adalah memberikan sosialisasi kepada pemerintahan Nagari tentang pedoman pembuatan peraturan Nagari.

- c. Masih perlu ditingkatkannya kesadaran Masyarakat bahwa keamanan lingkungan adalah tanggungjawab bersama;
- d. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap antisipasi bencana di masing-masing lingkungan;
- e. Kurangnya kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha;

Upaya yang telah dilakukan adalah :

1. Mengadakan Sosialisasi secara berkala berkaitan dengan Ketentraman Ketertiban dan Keamanan Wilayah;
2. Meningkatkan kesadaran hukum tentang hak dan Kewajiban yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha;

2. Seksi Ekonomi Pembangunan

Bidang ekonomi pembangunan di Kecamatan Batang Kapas pada umumnya berjalan baik, tetapi di bidang perkoperasian perlu peningkatan pemahaman tentang administrasi.

Upaya yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi bidang pembangunan sehingga memaksimalkan kegiatan pembangunan tersebut.

3. Seksi Kesejahteraan Sosial

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan bagi warga dan lingkungan
- b. Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Keluarga masih dirasa kurang
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi ikut serta mensukseskan pembangunan yang ada di wilayah mereka.

Upaya yang dilakukan adalah

- a. Meningkatkan peran Institusi masyarakat dan meningkatkan penyuluhan oleh kesehatan dan dinas Sektoral tentang pentingnya menjaga kesehatan serta memanfaatkan momentum kegiatan-kegiatan dalam penyuluhan secara langsung, berkala dan terpadu utamanya kegiatan Posyandu serta memanfaatkan momentum dalam memecahkan masalah.
- b. Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam peningkatan kesempatan kerja sama dengan Wali Nagari untuk memaksimalkan peran kader dan institusi Masyarakat dalam peningkatan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya memaksimalkan pencapaiantarget Keluarga Berencana.

2) Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Terhadap Capaian Program Nasional

Dalam satu kerangka pembangunan nasional yang terintegrasi, Rancangan awal RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan telah dipaduselaraskan dan diharmonisasikan dengan visi dan misi Presiden sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2021-2026 serta visi dan misi gubernur Sumatera Barat dalam rancangan RPJMD Sumbar Tahun 2025-2029.

Pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan untuk tahun 2025-2029 berdampak terhadap capaian program nasional yaitu memajukan kehidupan masyarakat dari semua sektor, seperti pendidikan, ekonomi, sosial budaya dan pariwisata. Pembangunan menyeluruh diharapkan dapat meningkatkan penggalan sumber daya dalam proses mewujudkan masyarakat yang maju dan mandiri dalam kehidupan masyarakat madani.

3) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Batang Kapas

Tantangan

1. Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas Pemerintahan.
2. Belum optimalnya koordinasi dengan dan antar Dinas Teknis terkait.
3. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah.

Peluang

1. Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana wilayah serta pelayanan publik.
2. Adanya Peraturan Bupati yang mendukung pelaksanaan tupoksi Kecamatan.
3. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Batang Kapas Tahun 2026 terhadap kebutuhan yang dapat dilihat pada Tabel 2.3. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa semua program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD, hal ini disebabkan karena program dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan. Namun untuk besaran anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan yang dikarenakan adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 2.3
Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Pesisir Selatan

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Batang Kapas

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan (data renstra tahun 2026) | | | | | Catatan Penting |
|----|--|-------------------------------|---|----------------|----------------------|--|-------------------------------|---|----------------|----------------------|-----------------|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp) | |
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Kecamatan Batang Kapas | Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten (%) | 100 | 1.716.200.000 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Kecamatan Batang Kapas | Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten (%) | 100 | 1.716.200.000 | |
| | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kecamatan Batang Kapas | Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah (%) | 100 | 8.000.000 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kecamatan Batang Kapas | Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah (%) | 100 | 8.000.000 | |
| | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Kecamatan Batang Kapas | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen) | 4 | 4.000.000 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Kecamatan Batang Kapas | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen) | 4 | 4.000.000 | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kecamatan Batang Kapas | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan) | 8 | 4.000.000 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kecamatan Batang Kapas | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan) | 8 | 4.000.000 | |
| | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kecamatan Batang Kapas | Persentase Tertib Administrasi Keuangan (%) | 100 | 1.434.200.000 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kecamatan Batang Kapas | Persentase Tertib Administrasi Keuangan (%) | 100 | 1.434.200.000 | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kecamatan Batang Kapas | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan) | 168 | 1.388.000.000 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kecamatan Batang Kapas | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan) | 168 | 1.388.000.000 | |
| | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kecamatan Batang Kapas | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen) | 12 | 46.200.000 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kecamatan Batang Kapas | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen) | 12 | 46.200.000 | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kecamatan Batang Kapas | Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah (%) | 100 | 123.000.000 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kecamatan Batang Kapas | Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah (%) | 100 | 123.000.000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---|------------|-------------------|---|-------------------------------|---|------------|-------------------|
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kecamatan Batang Kapas | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket) | 1 | 3.000.000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kecamatan Batang Kapas | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket) | 1 | 3.000.000 |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kecamatan Batang Kapas | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket) | 0 | 0 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kecamatan Batang Kapas | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket) | 0 | 0 |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kecamatan Batang Kapas | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket) | 3 | 12.000.000 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kecamatan Batang Kapas | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket) | 3 | 12.000.000 |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kecamatan Batang Kapas | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket) | 2 | 4.000.000 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kecamatan Batang Kapas | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket) | 2 | 4.000.000 |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kecamatan Batang Kapas | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (dokumen) | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kecamatan Batang Kapas | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (dokumen) | | |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kecamatan Batang Kapas | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan) | 1 | 6.000.000 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kecamatan Batang Kapas | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan) | 1 | 6.000.000 |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kecamatan Batang Kapas | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan) | 4 | 98.000.000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kecamatan Batang Kapas | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan) | 4 | 98.000.000 |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kecamatan Batang Kapas | Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%) | 100 | 20.000.000 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kecamatan Batang Kapas | Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%) | 100 | 20.000.000 |
| Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kecamatan Batang Kapas | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (unit) | | 0 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kecamatan Batang Kapas | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (unit) | | 0 |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kecamatan Batang Kapas | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit) | 4 | 20.000.000 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kecamatan Batang Kapas | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit) | 4 | 20.000.000 |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kecamatan Batang Kapas | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit) | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kecamatan Batang Kapas | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit) | | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kecamatan Batang Kapas | Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) | 100 | 50.000.000 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kecamatan Batang Kapas | Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) | 100 | 50.000.000 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|-------------------------------|---|------------|-------------------|--|-------------------------------|---|------------|-------------------|
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kecamatan Batang Kapas | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan) | 4 | 4.000.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kecamatan Batang Kapas | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan) | 4 | 4.000.000 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kecamatan Batang Kapas | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan) | 4 | 46.000.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kecamatan Batang Kapas | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan) | 4 | 46.000.000 |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kecamatan Batang Kapas | Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik (%) | 100 | 81.000.000 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kecamatan Batang Kapas | Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik (%) | 100 | 81.000.000 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kecamatan Batang Kapas | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit) | 4 | 57.000.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kecamatan Batang Kapas | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit) | 4 | 57.000.000 |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kecamatan Batang Kapas | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit) | 8 | 4.000.000 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kecamatan Batang Kapas | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit) | 8 | 4.000.000 |
| | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kecamatan Batang Kapas | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit) | 2 | 20.000.000 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kecamatan Batang Kapas | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit) | 2 | 20.000.000 |
| 2. | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Kecamatan Batang Kapas | Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Kecamatan | 82 | 0 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Kecamatan Batang Kapas | Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Kecamatan | 82 | 0 |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Kecamatan Batang Kapas | Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat (%) | 70 | 0 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Kecamatan Batang Kapas | Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat (%) | 70 | 0 |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Kecamatan Batang Kapas | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (laporan) | | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Kecamatan Batang Kapas | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (laporan) | | |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Kecamatan Batang Kapas | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (laporan) | | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Kecamatan Batang Kapas | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (laporan) | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------------------------------|--|-----------|-------------------|---|-------------------------------|--|-----------|-------------------|--|
| 3. | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Kecamatan Batang Kapas | Persentase usulan masyarakat yang menjadi prioritas kecamatan (%) | 40 | 17.000.000 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Kecamatan Batang Kapas | Persentase usulan masyarakat yang menjadi prioritas kecamatan (%) | 40 | 17.000.000 | |
| | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Kecamatan Batang Kapas | Persentase Nagari yang difasilitasi kegiatan pemberdayaan (%) | 40 | 17.000.000 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Kecamatan Batang Kapas | Persentase Nagari yang difasilitasi kegiatan pemberdayaan (%) | 40 | 17.000.000 | |
| | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Kecamatan Batang Kapas | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (lembaga kemasyarakatan) | 10 | 7.000.000 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Kecamatan Batang Kapas | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (lembaga kemasyarakatan) | 10 | 7.000.000 | |
| | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kecamatan Batang Kapas | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (laporan) | 4 | 10.000.000 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kecamatan Batang Kapas | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (laporan) | 4 | 10.000.000 | |
| 4. | Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban umum | Kecamatan Batang Kapas | Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%) | 80 | 0 | Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban umum | Kecamatan Batang Kapas | Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%) | 80 | 0 | |
| | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Kecamatan Batang Kapas | Persentase fasilitasi dan kordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%) | 80 | 0 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Kecamatan Batang Kapas | Persentase fasilitasi dan kordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%) | 80 | 0 | |
| | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Kecamatan Batang Kapas | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (laporan) | | | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Kecamatan Batang Kapas | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (laporan) | | | |
| | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Kecamatan Batang Kapas | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (laporan) | | | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Kecamatan Batang Kapas | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (laporan) | | | |
| 5. | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Kecamatan Batang Kapas | Persentase Penugasan terkait pemerintahan umum (%) | 80 | 6.000.000 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Kecamatan Batang Kapas | Persentase Penugasan terkait pemerintahan umum (%) | 80 | 6.000.000 | |

| | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Kecamatan Batang Kapas | Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti (%) | 80 | 6.000.000 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Kecamatan Batang Kapas | Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti (%) | 80 | 6.000.000 |
|-----------|--|-------------------------------|---|-----------|----------------------|--|-------------------------------|---|-----------|----------------------|
| | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Kecamatan Batang Kapas | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (orang) | | | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Kecamatan Batang Kapas | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (orang) | | |
| | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Kecamatan Batang Kapas | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (dokumen) | 1 | 6.000.000 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Kecamatan Batang Kapas | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (dokumen) | 1 | 6.000.000 |
| 6. | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa | Kecamatan Batang Kapas | Jumlah nagari lingkup kecamatan yang memiliki pengelolaan keuangan dan administrasi yang baik (Nagari) | 10 | 2.000.000 | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa | Kecamatan Batang Kapas | Jumlah nagari lingkup kecamatan yang memiliki pengelolaan keuangan dan administrasi yang baik (Nagari) | 10 | 2.000.000 |
| | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kecamatan Batang Kapas | Jumlah pemerintahan nagari yang dibina dan diawasi (nagari) | 10 | 2.000.000 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kecamatan Batang Kapas | Jumlah pemerintahan nagari yang dibina dan diawasi (nagari) | 10 | 2.000.000 |
| | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Kecamatan Batang Kapas | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (dokumen) | | | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Kecamatan Batang Kapas | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (dokumen) | | |
| | Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | Kecamatan Batang Kapas | Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (dokumen) | 4 | 2.000.000 | Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | Kecamatan Batang Kapas | Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (dokumen) | 4 | 2.000.000 |
| | Jumlah | | | | 1.741.200.000 | Jumlah | | | | 1.741.200.000 |

Sumber data: Rentra dan renja 2026

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Selatan membuka akses yang luas kepada pemangku kepentingan dalam memberikan usulan pembangunan di daerahnya. Usulan rencana pembangunan dapat berasal *Bottom Up* yaitu usulan dari masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Nagari, Kecamatan dan tingkat Kabupaten Pesisir Selatan. Selain itu usulan rencana pembangunan juga berasal dari usulan *Top Down* dari kunjungan kerja Bupati dan Reses DPRD.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang diusulkan oleh pemangku kepentingan berdasarkan pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan yang mana penjangkaran kebutuhan masyarakat dilakukan melalui sistem E-Planning yang diajukan ke Kecamatan Batang Kapas. Usulan kegiatan masyarakat selanjutnya akan diverifikasi oleh Kecamatan Batang Kapas berdasarkan syarat teknis yang telah ditentukan. Dari usulan tersebut akan ditentukan prioritas usulan yang dapat diakomodir oleh Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan serta anggaran.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2026 dari Para Pemangku Kepentingan pada saat musrenbang tingkat Kecamatan Batang Kapas Tahun 2025 adalah sebagai tabel 2.4. berikut:

Tabel 2.4 Tabel. T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan

| No | Program Pro-Rakyat | Arah Pembangunan Tahun 2026 | Usulan Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Lokasi (Nagari) | Volume | Pagu (Rp) | OPD Penanggung Jawab | Keterangan | | | |
|----|--------------------|---|-----------------|--|--|------------------------------|-----------|----------------------|--------------------------------|----------|------------|---|
| | | | | | | | | | SPM | Stunting | Kemiskinan | |
| 1 | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
| 1 | Nagari Kanyang | Memperkuat basis agrikultur/pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan | 1 | Pembangunan Jalan usaha tani | akses jalan yang memadai untuk mengangkut hasil pertanian. | IV Koto Hilie (Salak Jalamu) | 1000 m | 250.000.000 | Dinas Pertanian dan Dinas PUTR | | | |
| | | | 2 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Sawah Solok | Mengairi Tanaman Pertanian Masyarakat, dan Otomasi hasil panen meningkat | Selok Sungai Pampan | ± 800 M | 250.000.000 | PUTR | | √ | √ |
| | | | 3 | Bendungan Teratak Tempatih untuk Irigasi sawah lubuk nyiur | melancarkan aliran irigasai sawah teratak tempatih lubuk nyiur | Teratak Tempatih | | 500.000.000 | PUTR | | √ | |

Sumber Data : Musrenbang Kecamatan Batang Kapas Tahun 2025

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sehubungan dengan pelaksanaan Nawacita dimana pelaksanaan pembangunan dari pinggir Kecamatan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembinaan dan pengawasan pemerintah Desa/Nagari sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam mewujudkan pembangunan Desa/Nagari, tujuan/indikator yang bisa ditetapkan Kecamatan Batang Kapas adalah:

1. Mengoptimalkan fungsi fasilitasi Pembinaan produk unggul nagari dan pemberdayaan masyarakat
2. Koordinasi penetapan rencana pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh (pembangunan kawasan pedesaan berbasis ternak sapi bali).

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2026 mengacu pada visi dan misi Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan serta selaras dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2029.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan dan merupakan lanjutan dari periode pembangunan lima tahun sebelumnya. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029. Visi Kabupaten Pesisir Selatan 2025-2029 adalah:

“PESISIR SELATAN MAJU, TUMBUH DAN BERKELANJUTAN”

Penjabaran dan filosofi dari visi tersebut adalah sebagai berikut: Visi ini mencerminkan tekad Pemerintah Daerah dalam membangun wilayah yang

memiliki daya saing tinggi, memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, serta memastikan pembangunan yang berkelanjutan. Penjelasan visi tersebut adalah sebagai berikut:

- a) **Maju:** Mengacu pada pembangunan yang progresif di berbagai sektor yang berarti Pesisir Selatan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang modern, pelayanan publik yang prima, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Kemajuan juga mencakup peningkatan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan teknologi guna menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
- b) **Tumbuh:** Mencerminkan dinamika pembangunan yang berkelanjutan, progresif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat serta kemajuan daerah secara keseluruhan. Dengan demikian, “tumbuh” bukan hanya sekadar pertumbuhan fisik dan ekonomi, tetapi juga mencerminkan pembangunan yang menyeluruh, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini menandakan adanya perubahan yang positif, berkesinambungan, serta mampu menjawab tantangan zaman demi mewujudkan daerah yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing.
- c) **Berkelanjutan:** Menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Dengan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak, mengembangkan energi terbarukan, serta menerapkan kebijakan ramah lingkungan, Pesisir Selatan berupaya memastikan bahwa kemajuan yang dicapai hari ini dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan. Misi pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan dan dilaksanakan bersama masyarakat untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah.

Berdasarkan pengertian ini maka misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- **“Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas”**. Misi ini menegaskan komitmen pemerintah daerah

dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Profesionalisme dan integritas menjadi dua pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang melayani masyarakat dengan baik, menjalankan kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintah. Pemerintahan yang profesional dan berintegritas merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Profesionalisme dalam pemerintahan mencerminkan tata kelola yang berbasis kompetensi, transparansi, serta akuntabilitas dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Sementara itu, integritas menegaskan komitmen untuk menjalankan tugas dengan jujur, adil, dan bebas dari korupsi. Misi ini bertujuan untuk menciptakan aparatur pemerintahan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas tinggi, mengedepankan nilai-nilai etika, serta senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat. Dengan adanya sistem yang berorientasi pada kinerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, diharapkan pelayanan publik semakin efektif dan efisien. Komitmen terhadap integritas juga menjadi landasan dalam misi ini, dengan menanamkan budaya anti-korupsi serta menerapkan sistem pengawasan yang ketat. Dengan demikian, pemerintahan dapat beroperasi secara transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

- **“Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing”**. Misi "Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing" merupakan wujud dari komitmen untuk membangun bangsa yang tangguh, cerdas, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Misi ini bertujuan untuk menciptakan individu-individu yang tidak hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis, tetapi juga berkarakter kuat, adaptif terhadap perubahan, serta mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Langkah untuk mewujudkan misi ini meliputi peningkatan akses dan kualitas pendidikan, penguatan sistem pelatihan vokasi, serta pengembangan soft skills seperti kepemimpinan, komunikasi, dan kerja sama tim. Selain itu, penting

untuk menanamkan nilai-nilai integritas, kerja keras, dan semangat inovasi sejak dini agar tercipta generasi yang unggul dan berdaya saing. Melalui misi ini, kita berharap terbangunnya generasi yang tidak hanya siap kerja, tetapi juga siap menciptakan peluang kerja; generasi yang bukan hanya menjadi penonton, melainkan aktor utama dalam kemajuan bangsa.

- **“Pesisir Selatan Menjadi Sentra Pangan dan Destinasi Wisata Unggul untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera”**. Pesisir Selatan memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata yang dapat menjadi pilar utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai sentra pangan, Pesisir Selatan berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian serta perikanan. Dukungan terhadap petani dan nelayan melalui teknologi modern, akses pasar yang luas, serta peningkatan infrastruktur pertanian akan menjadi fokus utama. Diversifikasi produk pertanian dan perikanan juga akan didorong guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing di pasar nasional maupun internasional. Di sisi lain, sektor pariwisata akan dikembangkan dengan mengedepankan daya tarik alam, budaya, dan kearifan lokal. Pesisir Selatan yang kaya akan keindahan pantai, pulau, dan lanskap alam akan dikelola dengan pendekatan berkelanjutan agar tetap terjaga kelestariannya. Penguatan infrastruktur, promosi wisata, serta peningkatan kualitas layanan dan fasilitas akan menjadi langkah strategis dalam menarik wisatawan. Keseluruhan upaya ini bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Dengan meningkatnya peluang kerja, berkembangnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta meningkatnya pendapatan daerah, Pesisir Selatan diharapkan menjadi daerah yang maju, mandiri, dan sejahtera. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama dalam mewujudkan misi ini, sehingga Pesisir Selatan dapat terus berkembang sebagai sentra pangan dan destinasi wisata unggul di Indonesia.
- **“Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Adil dan Inklusif”**. Perwujudan misi ini merupakan fondasi utama dalam membangun masyarakat yang kuat dan bersatu. Untuk mewujudkan

hal ini, diperlukan upaya memperkuat nilai-nilai kebersamaan, toleransi, dan gotong royong di tengah masyarakat. Program yang mendorong interaksi sosial yang positif, dialog antar komunitas, serta pelestarian budaya lokal yang inklusif akan terus dikembangkan guna menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis. Memastikan bahwa tidak ada kesenjangan yang berlebihan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan, serta perlindungan hukum yang adil bagi semua, akan menjadi prioritas dalam mewujudkan masyarakat yang lebih setara dan berkeadilan.

- **“Mewujudkan Pesisir Selatan Lestari, Adaptif dan Tangguh Bencana”**. Pesisir Selatan Selatan merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam dan keindahan lingkungan, namun juga memiliki tantangan besar terkait perubahan iklim, degradasi lingkungan, serta risiko bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor. Oleh karena itu, misi ini bertujuan untuk menjaga kelestarian alam, meningkatkan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, serta memperkuat ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Mengacu kepada Visi, Misi serta Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yang berhubungan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan adalah: Misi ke 1 (Satu) yaitu: **“Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas”**,

Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2029 maka tujuan yang hendak dicapai yaitu:

“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualitas dan Bersinergi.”

Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan dengan indikator outcome yang terukur. Dalam perumusan Sasaran, harus benar-benar diperhatikan keterukuran dari indikator kinerja Sasaran yang akan diukur. Sasaran yang hendak dicapai dalam peningkatan pelayanan publik tahun 2026 yaitu:

- a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan.
- b. Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Pemerintahan Kecamatan.
- c. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kualitas Pembinaan Serta Pengawasan Pemerintahan Nagari.
- d. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

| No. | Tujuan | Sasaran | Indikator sasaran | Target Kinerja Tahun 2025 |
|------------------------------|---|--|---|---------------------------|
| 1. | Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi. | Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan yang Akuntabel dan Berkinerja | Nilai AKIP Perangkat Daerah | A (80,5) |
| | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 91 |
| | | Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah | Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan | 90 |
| | | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Nagari | Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik | 75% |
| | | | Angka Kemiskinan Ekstrim | 0% |
| Prevalensi Stunting (Eppgbm) | 6,65% | | | |
| 2. | Terciptanya kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang Aman, Tenteram dan Dinamis. | Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat | Persentase Konflik Yang Diselesaikan | 80% |

3.3. Program Dan Kegiatan

Bahan pertimbangan terhadap rumusan Rencana program dan kegiatan yang menjadi prioritas Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan dalam Renja 2026 ini adalah seperti yang telah tertuang dalam dokumen Renstra Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026 yang berfokus pada pencapaian visi dan misi Bupati Pesisir Selatan.

Rekapitulasi rencana program dan kegiatan tahun 2026:

| | |
|---------------------|---|
| Jumlah Program | : 5 (Lima) |
| Jumlah Kegiatan | : 9 (Sembilan) |
| Jumlah Sub Kegiatan | : 20 (Dua puluh) |
| Pagu Indikatif APBD | : Rp 2.071.752.825,- (<i>Dua milyar Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah</i>). |

Rencana Program dan Kegiatan yang menjadi prioritas Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 adalah:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:

Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah.
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan:

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
5. Fasilitasi Kunjungan Tamu.
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Sub Kegiatan:

1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sub Kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sub Kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik:

Kegiatan: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.

Sub Kegiatan:

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.

III. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa:

Kegiatan: Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Sub Kegiatan:

1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.
2. Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan.

IV. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.

Sub Kegiatan:

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.
2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

V. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Kegiatan: Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Sub Kegiatan:

1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
2. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

VI. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.

Sub Kegiatan:

1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.
2. Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Uraian rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

memiliki daya saing tinggi, memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, serta memastikan pembangunan yang berkelanjutan. Penjelasan visi tersebut adalah sebagai berikut:

- d) **Maju:** Mengacu pada pembangunan yang progresif di berbagai sektor yang berarti Pesisir Selatan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang modern, pelayanan publik yang prima, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Kemajuan juga mencakup peningkatan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan teknologi guna menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
- e) **Tumbuh:** Mencerminkan dinamika pembangunan yang berkelanjutan, progresif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat serta kemajuan daerah secara keseluruhan. Dengan demikian, “tumbuh” bukan hanya sekadar pertumbuhan fisik dan ekonomi, tetapi juga mencerminkan pembangunan yang menyeluruh, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini menandakan adanya perubahan yang positif, berkesinambungan, serta mampu menjawab tantangan zaman demi mewujudkan daerah yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing.
- f) **Berkelanjutan:** Menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Dengan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak, mengembangkan energi terbarukan, serta menerapkan kebijakan ramah lingkungan, Pesisir Selatan berupaya memastikan bahwa kemajuan yang dicapai hari ini dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan. Misi pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan dan dilaksanakan bersama masyarakat untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah.

Berdasarkan pengertian ini maka misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- **“Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas”.** Misi ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien,

transparan, dan akuntabel. Profesionalisme dan integritas menjadi dua pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang melayani masyarakat dengan baik, menjalankan kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah. Pemerintahan yang profesional dan berintegritas merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Profesionalisme dalam pemerintahan mencerminkan tata kelola yang berbasis kompetensi, transparansi, serta akuntabilitas dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Sementara itu, integritas menegaskan komitmen untuk menjalankan tugas dengan jujur, adil, dan bebas dari korupsi. Misi ini bertujuan untuk menciptakan aparat pemerintahan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas tinggi, mengedepankan nilai-nilai etika, serta senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat. Dengan adanya sistem yang berorientasi pada kinerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, diharapkan pelayanan publik semakin efektif dan efisien. Komitmen terhadap integritas juga menjadi landasan dalam misi ini, dengan menanamkan budaya anti-korupsi serta menerapkan sistem pengawasan yang ketat. Dengan demikian, pemerintahan dapat beroperasi secara transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

- **“Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing”**. Misi "Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing" merupakan wujud dari komitmen untuk membangun bangsa yang tangguh, cerdas, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Misi ini bertujuan untuk menciptakan individu-individu yang tidak hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis, tetapi juga berkarakter kuat, adaptif terhadap perubahan, serta mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Langkah untuk mewujudkan misi ini meliputi peningkatan akses dan kualitas pendidikan, penguatan sistem pelatihan vokasi, serta pengembangan soft skills seperti kepemimpinan, komunikasi, dan kerja sama tim. Selain itu, penting untuk menanamkan nilai-nilai integritas, kerja keras, dan semangat

inovasi sejak dini agar tercipta generasi yang unggul dan berdaya saing. Melalui misi ini, kita berharap terbangunnya generasi yang tidak hanya siap kerja, tetapi juga siap menciptakan peluang kerja; generasi yang bukan hanya menjadi penonton, melainkan aktor utama dalam kemajuan bangsa.

- **“Pesisir Selatan Menjadi Sentra Pangan dan Destinasi Wisata Unggul untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera”**. Pesisir Selatan memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata yang dapat menjadi pilar utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai sentra pangan, Pesisir Selatan berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian serta perikanan. Dukungan terhadap petani dan nelayan melalui teknologi modern, akses pasar yang luas, serta peningkatan infrastruktur pertanian akan menjadi fokus utama. Diversifikasi produk pertanian dan perikanan juga akan didorong guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing di pasar nasional maupun internasional. Di sisi lain, sektor pariwisata akan dikembangkan dengan mengedepankan daya tarik alam, budaya, dan kearifan lokal. Pesisir Selatan yang kaya akan keindahan pantai, pulau, dan lanskap alam akan dikelola dengan pendekatan berkelanjutan agar tetap terjaga kelestariannya. Penguatan infrastruktur, promosi wisata, serta peningkatan kualitas layanan dan fasilitas akan menjadi langkah strategis dalam menarik wisatawan. Keseluruhan upaya ini bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Dengan meningkatnya peluang kerja, berkembangnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta meningkatnya pendapatan daerah, Pesisir Selatan diharapkan menjadi daerah yang maju, mandiri, dan sejahtera. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama dalam mewujudkan misi ini, sehingga Pesisir Selatan dapat terus berkembang sebagai sentra pangan dan destinasi wisata unggul di Indonesia.
- **“Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Adil dan Inklusif”**. Perwujudan misi ini merupakan fondasi utama dalam membangun masyarakat yang kuat dan bersatu. Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan upaya memperkuat nilai-nilai kebersamaan,

toleransi, dan gotong royong di tengah masyarakat. Program yang mendorong interaksi sosial yang positif, dialog antar komunitas, serta pelestarian budaya lokal yang inklusif akan terus dikembangkan guna menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis. Memastikan bahwa tidak ada kesenjangan yang berlebihan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan, serta perlindungan hukum yang adil bagi semua, akan menjadi prioritas dalam mewujudkan masyarakat yang lebih setara dan berkeadilan.

- **“Mewujudkan Pesisir Selatan Lestari, Adaptif dan Tangguh Bencana”**. Pesisir Selatan Selatan merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam dan keindahan lingkungan, namun juga memiliki tantangan besar terkait perubahan iklim, degradasi lingkungan, serta risiko bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor. Oleh karena itu, misi ini bertujuan untuk menjaga kelestarian alam, meningkatkan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, serta memperkuat ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Mengacu kepada Visi, Misi serta Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yang berhubungan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan adalah: Misi ke 1 (Satu) yaitu: **“Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas”**,

Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2029 maka tujuan yang hendak dicapai yaitu:

“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualitas dan Bersinergi.”

Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan dengan indikator outcome yang terukur. Dalam perumusan Sasaran, harus benar-benar diperhatikan keterukuran dari indikator kinerja Sasaran yang akan diukur. Sasaran yang hendak dicapai dalam peningkatan pelayanan publik tahun 2026 yaitu:

- e. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan.
- f. Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Pemerintahan Kecamatan.
- g. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kualitas Pembinaan Serta Pengawasan Pemerintahan Nagari.
- h. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

| No. | Tujuan | Sasaran | Indikator sasaran | Target Kinerja Tahun 2025 |
|-----|---|--|---|---------------------------|
| 1. | Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi. | Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan yang Akuntabel dan Berkinerja | Nilai AKIP Perangkat Daerah | A (80,5) |
| | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 91 |
| | | Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah | Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan | 90 |
| | | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Nagari | Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik | 75% |
| | | | Angka Kemiskinan Ekstrim | 0% |
| | | | Prevalensi Stunting (Eppgbm) | 6,65% |
| 2. | Terciptanya kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang Aman, Tenteram dan Dinamis. | Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat | Persentase Konflik Yang Diselesaikan | 80% |

3.4. Program Dan Kegiatan

Bahan pertimbangan terhadap rumusan Rencana program dan kegiatan yang menjadi prioritas Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan dalam Renja 2026 ini adalah seperti yang telah tertuang dalam dokumen Renstra Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026 yang berfokus pada pencapaian visi dan misi Bupati Pesisir Selatan.

Rekapitulasi rencana program dan kegiatan tahun 2026:

| | |
|---------------------|---|
| Jumlah Program | : 5 (Lima) |
| Jumlah Kegiatan | : 9 (Sembilan) |
| Jumlah Sub Kegiatan | : 20 (Dua puluh) |
| Pagu Indikatif APBD | : Rp 2.071.752.825,- (<i>Dua milyar Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah</i>). |

Rencana Program dan Kegiatan yang menjadi prioritas Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 adalah:

VII. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:

Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan:

3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah.
4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan:

3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
4. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan:

7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
9. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

11. Fasilitasi Kunjungan Tamu.
12. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Sub Kegiatan:

1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sub Kegiatan:

3. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sub Kegiatan:

4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
5. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

VIII. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik:

Kegiatan: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.

Sub Kegiatan:

2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.

IX. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa:

Kegiatan: Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Sub Kegiatan:

3. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.
4. Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan.

X. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.

Sub Kegiatan:

3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.
4. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

XI. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Kegiatan: Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Sub Kegiatan:

3. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
4. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

XII. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.

Sub Kegiatan:

3. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.
4. Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Uraian rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel T-C.33. Tabel 3.2

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2026 (Data renstra 2026) | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | | | | |
|------|---|--|---|---|--|--|---|--|----------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|----------|---|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | | | |
| | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | KECAMATAN | | | | | | | | | 1.741.200.000 | | | 0 | | |
| 1 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | 1.716.200.000 | | | 0 | | |
| 1 | 01 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | 8.000.000 | | | 0 | |
| 1 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Kab. Pesisir Selatan, Batang Kapas, Batang Kapas | 100 % | 4 Dokumen | 100 % | 4.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | 100 % | 0 |
| 1 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Kab. Pesisir Selatan, Batang Kapas, Batang Kapas | 100 % | 20 Laporan | 100 % | 4.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | 100 % | 0 |
| 1 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | 1.434.200.000 | | | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|------|----|--|--|--|--|---|-------|-----------------|----------|--------------------|--------------------------------------|--|--|----------|---|
| 1 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Tertibnya administrasi kepegawaian perangkat daerah | Kab. Pesisir Selatan, Batang Kapas, Batang Kapas | 100 % | 168 Orang/bulan | 12 bulan | 1.388.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | 100 % | 0 |
| 1 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Tertibnya administrasi kepegawaian perangkat daerah | Kab. Pesisir Selatan, Batang Kapas, Semua Kelurahan | 100 % | 12 Dokumen | 12 bulan | 46.200.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | 100 % | 0 |
| 1 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | 123.000.000 | | | | 0 | |
| 1 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Tertibnya administrasi umum Perangkat daerah yang baik | Kab. Pesisir Selatan, Batang Kapas, Batang Kapas | 100 % | 2 Paket | 12 bulan | 3.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | 100 % | 0 |
| 1 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Tertibnya administrasi umum Perangkat daerah yang baik | Kab. Pesisir Selatan, Batang Kapas, Batang Kapas | 100 % | 0 Paket | 12 bulan | 0 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | 100 % | 0 |
| 1 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Tertibnya administrasi umum Perangkat daerah yang baik | Kab. Pesisir Selatan, Batang Kapas, Batang Kapas | 100 % | 3 Paket | 12 bulan | 12.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | 100 % | 0 |
| 1 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Tertibnya administrasi umum Perangkat daerah yang baik | Kab. Pesisir Selatan, Batang Kapas, Batang Kapas | 100 % | 2 Paket | 12 bulan | 4.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. | 100 % | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|------|----|---|--|--|---|--|-------|--|----------|-------------------|--------------------------------------|--|-------|----------|
| 1 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Tertibnya administrasi umum Perangkat daerah yang baik | Kab. Pesisir Selatan, Batang Kapas, Batang Kapas | 100 % | 1 Dokumen | 12 bulan | 0 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | 100 % | 0 |
| 1 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Tertibnya administrasi umum Perangkat daerah yang baik | Kab. Pesisir Selatan, Batang Kapas, Batang Kapas | 100 % | 1 Laporan | 12 bulan | 6.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | 100 % | 0 |
| 1 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Tertibnya administrasi umum Perangkat daerah yang baik | Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 4 Laporan | 12 bulan | 98.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | 100 % | 0 |
| 1 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | 20.000.000 | | | | 0 |
| 1 | 01 | 2.07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Kab. Pesisir Selatan, Batang Kapas, Batang Kapas | 100 % | 1 Unit Sepeda Motor | 1 unit | 0 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | 100 % | 0 |
| 1 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah | Kab. Pesisir Selatan, Batang Kapas, Batang Kapas | 100 % | 2 Unit Printer, 2 Unit Laptop | 4 unit | 20.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. | 100 % | 0 |
| 1 | 01 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Kab. Pesisir Selatan, Batang Kapas, Batang Kapas | 100 % | 1 Unit tempat tidur, 1 Set Kursi Tamu, 1 Unit AC | 3 unit | 0 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | 100 % | 0 |
| 1 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | 50.000.000 | | | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|------|----|---|--|--|--|--|-------|-----------|----------|-------------------|--------------------------------------|--|--|----------|---|
| 1 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah | Kab. Pesisir Selatan, Batang Kapas, Batang Kapas | 100 % | 4 Laporan | 12 bulan | 4.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | 100 % | 0 |
| 1 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah | Kab. Pesisir Selatan, Batang Kapas, Batang Kapas | 100 % | 4 Laporan | 12 bulan | 46.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | 100 % | 0 |
| 1 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | 81.000.000 | | | | 0 | |
| 1 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah daerah | Kab. Pesisir Selatan, Batang Kapas, Batang Kapas | 100 % | 4 Unit | 12 bulan | 57.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | 100 % | 0 |
| 1 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah | Kab. Pesisir Selatan, Batang Kapas, Batang Kapas | 100 % | 12 Unit | 12 bulan | 4.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | 100 % | 0 |
| 1 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | Terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah daerah | Kab. Pesisir Selatan, Batang Kapas, Batang Kapas | 100 % | 2 Unit | 12 bulan | 20.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | 100 % | 0 |
| 1 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| 1 | 02 | 2.04 | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|------|----|---|--|--|--|---|-----------------|------------|----------|-------------------|--|--|--|--|--|----------|----------|
| 1 | 02 | 2.04 | 02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah MTQ yang diikuti Jumlah remaja mesjid yang aktif Persentase Mesjid yang melaksanakan subuh berjamaah Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Kecamatan | Jumlah Laporan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | Terselenggaranya urusan penyelenggaraan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat di kecamatan Batang Kapas | Kab. Pesisir Selatan, Batang Kapas, Semua Kelurahan | | | | 0 | | | | | | | |
| 1 | 02 | 2.04 | 03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah MTQ yang diikuti Jumlah remaja mesjid yang aktif Persentase Mesjid yang melaksanakan subuh berjamaah Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Kecamatan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Terselenggaranya urusan penyelenggaraan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat di kecamatan Batang Kapas | Kab. Pesisir Selatan, Batang Kapas, Semua Kelurahan Kab. Pesisir Selatan, Batang Kapas, Batang Kapas | 85 Tanpa Satuan | 1 Laporan | 12 Bulan | 0 | | | | | | | |
| 1 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | | | | 17.000.000 | | | | | | 0 | |
| 1 | 03 | 2.01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | | | | 17.000.000 | | | | | | | 0 |
| 1 | 03 | 2.01 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Persentase usulan masyarakat yang menjadi prioritas kecamatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di nagari | Kab. Pesisir Selatan, Batang Kapas, Batang Kapas | | 10 Lembaga | 2 Bulan | 7.000.000 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|------|----|---|---|--|--|--|--|-----------|----------|------------------|--|--|--|--|--|----------|----------|
| 1 | 03 | 2.01 | 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Persentase usulan masyarakat yang menjadi prioritas kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di nagari | Kab. Pesisir Selatan, Batang Kapas, Batang Kapas | | 1 Laporan | 12 Bulan | 10.000.000 | | | | | | | |
| 1 | 04 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| 1 | 04 | 2.01 | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| 1 | 04 | 2.01 | 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Terciptanya lingkungan yang aman dan tertib | Kab. Pesisir Selatan, Batang Kapas, Batang Kapas | | 1 Laporan | 12 Bulan | 0 | | | | | | | |
| 1 | 04 | 2.01 | 02 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Terciptanya lingkungan yang aman dan tertib | Kab. Pesisir Selatan, Batang Kapas, Batang Kapas | | | | 0 | | | | | | | |
| 1 | 05 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | | | | | 6.000.000 | | | | | | 0 | |
| 1 | 05 | 2.01 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | | | 6.000.000 | | | | | | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----|------|----|--|---|---|---|--|--|-----------|----------------------|------------------|--|--|--|----------|----------|----------|
| 1 | 05 | 2.01 | 03 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Persentase Penugasan terkait pemerintahan umum | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kecamatan | Kab. Pesisir Selatan, Batang Kapas, Batang Kapas | | 12 Orang | 12 Bulan | 0 | | | | | | |
| 1 | 05 | 2.01 | 08 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Persentase Penugasan terkait pemerintahan umum | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kecamatan | Kab. Pesisir Selatan, Batang Kapas, Batang Kapas | | 1 Dokumen | 12 Bulan | 6.000.000 | | | | | | |
| 1 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | | | | | 2.000.000 | | | | | 0 | |
| 1 | 06 | 2.01 | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | | | 2.000.000 | | | | | | 0 |
| 1 | 06 | 2.01 | 02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah nagari lingkup kecamatan yang memiliki pengelolaan keuangan dan administrasi yang baik Jumlah Penetapan Kawasan Perdesaan | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan dan Adminstrasi Pemerintahan Nagari | Kab. Pesisir Selatan, Batang Kapas, Batang Kapas | | 1 Dokumen | | 0 | | | | | | |
| 1 | 06 | 2.01 | 10 | Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | Jumlah nagari lingkup kecamatan yang memiliki pengelolaan keuangan dan administrasi yang baik Jumlah Penetapan Kawasan Perdesaan yang difasilitasi | Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan dan Adminstrasi Pemerintahan Nagari | Kab. Pesisir Selatan, Batang Kapas, Batang Kapas | | | | 2.000.000 | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | 1.741.200.000 | | | | | 0 | | |

Sumber Data : Renstra kecamatan Batang Kapas Tahun 2025-2029

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Batang Kapas. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Kecamatan Batang Kapas kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Kecamatan Batang Kapas. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Batang Kapas.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1
Tabel TC-27 (data dari sipd)
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | kode | | | | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out come dan Kegiatan Output) | Data Pencapaian Pada Tahun Awal Perencanaan | Target kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 | | Unit Kerja OPD Penanggung jawab | Lokasi |
|--|--|-----------------------------|------|----|----|------|--|---|---|--|----------------------|---------------------------------|--------|
| | | | | | | | | | | Target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 20 | 21 |
| Terwujudnya Informasi Birokrasi yang Berkualitas dan Berkinerja Tinggi | Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan yang Akuntabel dan Berkinerja | Nilai AKIP Perangkat Daerah | 7 | 01 | 01 | 2.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten (%) | | 100 | 1.716.200.000 | Kec. Batang Kapas | |
| | | | | | | | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah (%) | | 100 | 8.000.000 | Kec. Batang Kapas | |
| | | | | | | | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen) | | 4 | 4.000.000 | Kec. Batang Kapas | |
| | | | | | | | Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan) | | 8 | 4.000.000 | Kec. Batang Kapas | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 7 | 01 | 01 | 2.02 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Tertib Administrasi Keuangan (%) | | 100 | 1.434.200.000 | Kec. Batang Kapas | |

| | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|---|--|------------|--------------------|--------------------------|--|
| | | | | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan) | 168 | 1.388.000.000 | Kec. Batang Kapas | |
| | | | | Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen) | 12 | 46.200.000 | Kec. Batang Kapas | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah (%) | 100 | 123.000.000 | Kec. Batang Kapas | |
| | | | | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket) | 1 | 3.000.000 | Kec. Batang Kapas | |
| | | | | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket) | | | | |
| | | | | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket) | 3 | 12.000.000 | Kec. Batang Kapas | |
| | | | | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket) | 2 | 4.000.000 | Kec. Batang Kapas | |
| | | | | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen) | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|--|---|--|------------|-------------------|--------------------------|--|
| | | | | Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (laporan) | | 1 | 6.000.000 | Kec. Batang Kapas | |
| | | | | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan) | | 4 | 98.000.000 | Kec. Batang Kapas | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%) | | 100 | 20.000.000 | Kec. Batang Kapas | |
| | | | | Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (unit) | | | | | |
| | | | | Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit) | | 4 | 20.000.000 | Kec. Batang Kapas | |
| | | | | Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Disediakan (unit) | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) | | 100 | 50.000.000 | Kec. Batang Kapas | |

| | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|---|---|------------|-------------------|--------------------------|--|
| | | | | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan) | 4 | 4.000.000 | Kec. Batang Kapas | |
| | | | | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan) | 4 | 46.000.000 | Kec. Batang Kapas | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik (%) | 100 | 81.000.000 | Kec. Batang Kapas | |
| | | | | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit) | 4 | 57.000.000 | Kec. Batang Kapas | |
| | | | | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit) | 8 | 4.000.000 | Kec. Batang Kapas | |
| | | | | Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit) | 2 | 20.000.000 | Kec. Batang Kapas | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|----|----|------|---|--|-----|-----------|-------------------|--|--|
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 7 | 01 | 02 | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Kecamatan | 85% | 0 | Kec. Batang Kapas | | |
| | | 7 | 01 | 02 | 2.04 | Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat (%) | 70 | 0 | Kec. Batang Kapas | | |
| | | | | | | Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (laporan) | | | | | |
| | | | | | | Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (laporan) | | | | | |
| Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Nagari | Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik | 7 | 01 | 06 | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA | Jumlah nagari lingkup kecamatan yang memiliki pengelolaan keuangan dan administrasi yang baik (Nagari) | 10 | 2.000.000 | Kec. Batang Kapas | | |
| | Prevalensi Stunting (Eppgbm) | 7 | 01 | 06 | 2.01 | Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah pemerintahan nagari yang dibina dan diawasi (nagari) | 10 | 2.000.000 | Kec. Batang Kapas | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----|----|------|--|---|--|-----------|-------------------|--------------------------|--|
| | Angka Kemiskinan Ekstrim | | | | | Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (dokumen) | | | | | |
| Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah | Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan | | | | | Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (dokumen) | | 1 | 2.000.000 | Kec. Batang Kapas | |
| | | 7 | 01 | 03 | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase usulan masyarakat yang menjadi prioritas kecamatan (%) | | 40 | 17.000.000 | Kec. Batang Kapas | |
| | | 7 | 01 | 03 | 2.01 | Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Persentase Nagari yang difasilitasi kegiatan pemberdayaan (%) | | 40 | 17.000.000 | Kec. Batang Kapas | |
| | | | | | | Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (lembaga kemasyarakatan) | | 10 | 7.000.000 | Kec. Batang Kapas | |
| | | | | | | Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (laporan) | | 1 | 10.000.000 | Kec. Batang Kapas | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|----|----|------|---|---|-----|-----------|----------------------|--|
| <p>kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan ketertarikan dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan ketertarikan dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan</p> | <p>Meningkatnya Ketertarikan Dan Ketertiban Masyarakat</p> | <p>Persentase Konflik Yang Diselesaikan</p> | 7 | 01 | 05 | | <p>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</p> | <p>Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)</p> | 80% | 0 | Kec. Batang Kapas | |
| | | | 7 | 01 | 05 | 2.01 | <p>Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</p> | <p>Persentase fasilitasi dan koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)</p> | 80% | 0 | Kec. Batang Kapas | |
| | | | | | | | <p>Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</p> | <p>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (laporan)</p> | | | | |
| | | | | | | | <p>Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</p> | <p>Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (laporan)</p> | | | | |
| | | | 7 | 01 | 05 | | <p>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</p> | <p>Persentase Penugasan terkait pemerintahan umum (%)</p> | 80 | 6.000.000 | Kec. Batang Kapas | |

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis tahun 2025–2029. Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsi serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan tahun 2026.

Penyusunan Renja didasarkan pada program dan kegiatan dengan berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan feedback terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi.

Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan OPD adalah sebagai berikut:

1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja OPD.
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada.
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis.
4. Mewujudkan sinergitas, efisiensi dan efektifitas perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

Untuk mengetahui efektifitas dan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan ini, akan diadakan evaluasi dan dipertanggungjawabkan kepada Bupati Pesisir Selatan.